



Diplomasi Kuasi Mediasi Tiongkok dalam Menjembatani Penyelesaian Konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia Tahun 2020-2022

Theresia Kariani Yolin^{1*}, Indra Wisnu Wibisono², Roberto Octavianus Cornelis Seba³
^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Komunikasi, Prodi Hubungan Internasional, Universitas Kristen

Satya Wacana, Indonesia

Alamat: Jl Diponegoro No. 52 Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: 372021035@student.uksw.edu

Abstract: *The Tigray conflict and the Ethiopian Government in 2020-2022 were mainly motivated by dissatisfaction with the policies of Prime Minister Abiy Ahmed. TPLF as a representative party of the Tigray ethnic group attacked the government until it received a counterattack that further prolonged the conflict situation. The conflict then sparked international attention, including China. China played a role in bridging the conflict resolution indirectly. This study aims to review the efforts made by China in helping to bridge the conflict resolution. The method used uses a descriptive qualitative approach. The study found that China fully used a quasi-mediation diplomacy strategy in an effort to resolve the conflict. China's efforts are reflected through personal identity and the results of the interactions that were established. China promotes the principle of non-intervention and regional resolution, even providing humanitarian assistance and sustainable development. China is not directly involved in maintaining national interests, both materially and socially, in the form of applicable relations and norms.*

Keyword: *Quasi-Mediation Diplomacy, Tigray, Ethiopian Government*

Abstrak: Konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia tahun 2020-2022 secara garis besar dilatar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap kebijakan Perdana Menteri Abiy Ahmed. TPLF sebagai partai perwakilan Etnis Tigray melakukan serangan kepada pemerintah hingga memperoleh serangan balik yang semakin memperpanjang situasi konflik. Konflik tersebut kemudian memicu perhatian dunia internasional termasuk Tiongkok. Tiongkok memainkan peran dalam menjembatani penyelesaian konflik secara tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh Tiongkok dalam membantu menjembatani penyelesaian konflik. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian menghasilkan bahwa Tiongkok secara penuh menggunakan strategi diplomasi kuasi mediasi dalam upaya penyelesaian konflik. Upaya Tiongkok tersebut tercermin melalui identitas personal serta hasil interaksi yang terjalin. Tiongkok mendorong prinsip non intervensi dan penyelesaian secara regional bahkan memberikan bantuan kemanusiaan serta pembangunan berkelanjutan. Tiongkok tidak terlibat secara langsung untuk menjaga kepentingan nasional baik secara material maupun sosial berupa relasi dan norma yang berlaku.

Kata Kunci: Diplomasi Kuasi Mediasi, Tigray, Pemerintah Ethiopia

1. LATAR BELAKANG

Konflik merupakan hal melekat dalam kehidupan sosial yang sulit dihindari karena pertentangan antara individu maupun kelompok. Di dunia internasional konflik disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Hampir semua negara di dunia sering mengalami konflik, baik konflik eksternal maupun konflik internal negara. Kawasan Afrika dikenal dengan kawasan yang cukup konflikual. Tak terkecuali Ethiopia tidak pernah terhindar dari isu persoalan konflik. Sejak dahulu hingga sekarang Ethiopia sering memperoleh tantangan internal berupa konflik saudara yang melibatkan etnis. Pada tahun 1995 ketika Rezim Front Revolusioner Rakyat Ethiopia atau EPRDF memimpin negara tersebut, menerapkan sistem federalisme dengan memberikan

kewenangan atas wilayah yang ditinggalkan oleh etnis-etnis (Admassu, 2019). Kebijakan tersebut ternyata semakin kontroversial karena membuka peluang yang lebih besar konflik.

Konflik mulai terjadi tanggal 4 November 2020 dan berakhir pada November 2022. Perdana Menteri Ethiopia bernama Abiy Ahmed memerintahkan serangan militer kepada pasukan regional Tigray dengan alasan sebagai respon atas tindakan serangan oleh pasukan Tigray pada wilayah militer pemerintah. Tindakan saling serang semakin besar hingga menyeret negara tetangga Ethiopia yaitu Eritrea, juga pasukan Amhara dan sekelompok militer Oromo. Akibat dari konflik ini berdasarkan informasi dari Olusegun Obasanjo yang menjabat sebagai utusan Uni Afrika, konflik telah menghilangkan nyawa 60000 warga sipil. Korban jiwa yang timbul dari konflik tersebut disebabkan oleh berbagai faktor penyebab mulai dari kelaparan, pertempuran, dan minimnya bantuan kesehatan. Jumlah yang meninggal karena kelaparan berjumlah kurang lebih 1400 orang (Mekelle & Nairobi, 2023). Berdasarkan data (Migration, 2021) pertanggal 30 Juni 2021 UNCHR mengumpulkan data bahwa sebanyak 46.505 pengungsi melakukan pengungsian ke wilayah Sudan. Konflik juga berdampak terhadap penurunan investasi tahun 2021 sebesar -90,39 US\$ juta dan 2022 sebesar 139, 17 US\$ juta (Zhou, 2025)

Konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia merupakan satu konflik yang besar dan menyita perhatian dunia termasuk Tiongkok. Ketika Ethiopia dilanda konflik internal tersebut Tiongkok terlibat sebagai pihak eksternal yang menjembatani penyelesaian konflik melalui strategi diplomasi kuasi mediasi. Diplomasi kuasi mediasi dilakukan ketika mengalami ancaman terhadap kepentingan nasional. Ethiopia merupakan salah satu partner terkuat Tiongkok di kawasan Afrika. Tiongkok merupakan investor dan pemberi pinjaman utama Ethiopia. Pada tahun 2000-2019 jumlah pinjaman Ethiopia ke Tiongkok mencapai 13,729 miliar (Fiala, 2021). Secara garis besar Afrika menjadi salah satu ladang Tiongkok menerapkan *strategi partnership* melalui ekonomi, politik, dan keamanan. Keberadaan Tiongkok di Kawasan Afrika sudah cukup memberikan pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kawasan maupun negara. Hal ini kemudian menjadi bagian faktor perekat hubungan negara-negara Afrika tak terkecuali Ethiopia.

Keberadaan Tiongkok di Ethiopia dalam merespon konflik tersebut lebih diterima dengan aktivitas keluar masuk para pejabat-pejabat Tiongkok ke wilayah Ethiopia seperti Duta Besar Zhao Zhiyuan (Fiala, 2021). Strategi diplomasi kuasi mediasi menempatkan Tiongkok untuk tidak bertindak secara langsung dalam upaya penyelesaian konflik. Strategi yang dilakukan Tiongkok sejalan dengan yang diinginkan oleh Ethiopia agar pihak eksternal tidak ikut campur dalam persoalan tersebut. Sedangkan Barat seperti Amerika cenderung tidak

dipedulikan oleh Pemerintah Ethiopia. Beberapa kali kesempatan Amerika berusaha mendekati Ethiopia melalui kunjungan bilateral seperti yang dilakukan oleh Samantha Power, Administrator USAID tetapi ditolak. Senator Chris Coons juga melakukan kunjungan dan meminta gencatan senjata, tetapi ditolak oleh Pemerintah karena dianggap hanya berfokus pada pemerintah saja.

Penelitian-penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji terkait konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia tahun 2020-2022. Pertama, penelitian yang dilakukan (Lumintosari et al., 2021) berjudul “Peran UNCHR dalam Permasalahan Pengungsi Konflik Ethiopia-Tigray” memaparkan bahwa konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia tahun 2020-2022 menimbulkan dampak serius terhadap kemanusiaan seperti melonjaknya pengungsi ke wilayah Sudan untuk mencari keselamatan. Kedua, penelitian yang dilakukan (Wijayanti & Aini, 2023) dengan judul “Uni Afrika: Membangun Jembatan Perdamaian dalam Konflik Pemerintah Ethiopia dan Tigray” menunjukkan bahwa Ethiopia diawal menginginkan penyelesaian konflik secara internal bahkan sempat menolak Uni Afrika. Tetapi seiring berjalannya waktu didukung oleh dorongan aktor lain termasuk Tiongkok menjadikan Ethiopia menerima penyelesaian permasalahan secara mandiri. Ketiga, penelitian yang dilakukan (Sari et al., 2022) dengan judul “Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani Conflict-Related Sexual Violence di Tigray” menjelaskan konflik tersebut menimbulkan dampak serius pada perempuan berupa tindakan kekerasan hingga pelecehan. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad, N. F. A., Putri, G. H., Aulia, D. F., & Prakoso, 2024) dengan judul “Unraveling the Political Motives of Eritrea in the Tigray Conflict” tulisan ini menjelaskan intervensi militer oleh Eritrea atas persetujuan dengan Pemerintah Ethiopia Abiy Ahmed. Keterlibatan Eritrea sebagai wadah berbalas dendam terhadap TPLF sebagai partai perwakilan Tigray yang pernah menjadi musuhnya ketika masih berkuasa di Ethiopia.

Telah ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang konflik pemerintah dan kelompok Tigray yang terjadi pada tahun 2020-2022. Namun, belum ada penelitian terdahulu berfokus peran yang dilakukan Tiongkok penyelesaian konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia tahun 2020-2022. Sehingga itulah yang menjadi kebaruan pada penelitian ini. Hal ini perlu dilakukan agar dapat semakin mendalam mengetahui peran Tiongkok sebagai aktor internasional yang juga bertanggung jawab untuk perdamaian. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk semakin mendalami upaya Tiongkok melalui strategi diplomasi kuasi mediasi dalam membantu menjembatani penyelesaian konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia tahun 2020-2022.

2. KAJIAN TEORITIS

Konstruktivisme

Teori konstruktivisme mencoba melengkapi pandangan atau teori rasionalis hubungan internasional yang terdahulu. Alexander Wendt merupakan salah satu tokoh penting yang mengemukakan pandangannya dalam teori konstruktivisme ini. Konstruktivisme meninjau lebih dalam, bahwa interaksi negara dalam dunia internasional didasarkan pada ide, norma, dan identitas (Wendt, 1999). Konstruktivisme tidak bermaksud mengabaikan kekuatan material seperti yang diungkap dalam teori terdahulu, tetapi konstruktivisme berpandangan konsep-konsep seperti ide, norma, identitas menjadi bagian penting dalam setiap tindakan dan interaksi aktor negara dalam dunia internasional. Pada tulisan ini penulis berfokus pada konstruktivisme identitas. Identitas bagian dari konstruktivisme dinilai lebih relevan dalam mengkaji tulisan ini.

Identitas merupakan sifat yang melekat pada aktor yang berasal dari dalam dan hasil interaksi sosial (Wendt, 1999). Identitas menjadi dasar motivasi dan mendorong perilaku negara tersebut pada kebijakan luar negeri. Dalam buku *Social Theory of International Politics* (Wendt, 1999) Pertama identitas personal atau korporat merupakan identitas yang dibentuk secara internal atau melekat diri aktor negara. Kedua identitas tipe merujuk pada pelabelan yang diberikan berdasarkan perilaku maupun kemampuan yang kemudian menjadi karakteristik yang melekat dari aktor. Ketiga identitas peran merupakan identitas yang dimiliki oleh aktor tertentu ketika terdapat harapan dan interaksi yang terjalin dengan aktor lain. Identitas hanya dapat dilakukan apabila ada interaksi atau relasi yang terjalin dengan aktor negara lain. Keempat identitas kolektif merupakan identitas yang mendorong kebersamaan mencapai suatu hal yang diinginkan. Identitas-identitas tersebut yang kemudian menjadi alasan pada setiap kebijakan luar negeri yang dilakukan.

Landasan Konseptual

Diplomasi Kuasi Mediasi

Diplomasi kuasi-mediasi merupakan diplomasi yang dilakukan oleh suatu aktor negara dalam upaya penyelesaian konflik secara tidak langsung atau tidak melibatkan diri secara penuh tanpa mendominasi. Diplomasi kuasi mediasi akan dijalankan apabila berdampak terhadap kepentingan suatu negara (Sun, D. & Zoubir, 2017). Menurut pendapat Helbert C Kelman, diplomasi kuasi-mediasi merupakan upaya penyelesaian konflik oleh aktor tertentu tanpa menggunakan jalur formal dan tidak bertindak sebagai pihak utama (Nanda, 2024). Kelman menegaskan aktor yang melakukan diplomasi kuasi-mediasi dilakukan memberikan dorongan dan dukungan pada dialog dan saling memahami satu sama lain diantar pihak berkonflik. Diplomasi kuasi mediasi terdiri dari empat jenis. Pertama intervensi multifaset,

menempatkan pihak ketiga ikut dalam penyelesaian konflik namun hanya sebagai fasilitator dan memberikan tekanan maupun sanksi. Kedua partisipasi proaktif, pihak ketiga hanya menjadi fasilitator tetapi tidak diikuti dengan sanksi atau tekanan. Ketiga interseksi terbatas, pihak ketiga bertindak terbatas dan tidak terlalu aktif melalui kekuatan politik atau ekonomi hanya bersifat simbolis dan bersifat sementara. Keempat keterlibatan secara tidak langsung, pihak ketiga tidak bertindak secara langsung atau tertutup. Pada keempat tingkatan diplomasi kuasi-mediasi tersebut cenderung menggunakan tingkatan kedua, ketiga, dan keempat (Sun, D. & Zoubir, 2017).

Kepentingan Nasional

Menurut Alexander Wendt (Nanda, 2024) kepentingan nasional tidak datang dengan sendiri melainkan muncul karena adanya identitas yang dimiliki oleh negara itu. Kepentingan nasional ditentukan oleh identitas suatu negara. Sehingga kepentingan nasional tersebut tidak dapat dikatakan stabil melainkan dinamis berdasarkan identitas atau proses interaksi yang terjalin antar negara. Selain itu Alexander Wendt menegaskan identitas dipengaruhi oleh norma sosial, oleh karena itu norma dapat peran dalam menentukan identitas perilaku suatu negara. Alexander Wendt meluruskan meskipun norma berpengaruh terhadap identitas tetapi faktor internal negara seperti identitas lebih dominan. Kepentingan nasional bukan hanya bersifat material tetapi sosial. Sejalan dengan ciri khas kepentingan yang dianggap dinamis kemudian Alexander Wendt menggambarkan pada struktur sosial yang terdiri dari tiga element yaitu syarat material, kepentingan dan pandangan baru inspirasi. Ketiga hal tersebut memiliki kaitan. Syarat material berupa ekonomi hingga fasilitas atau teknologi termasuk militer. Syarat material ada ketika suatu negara memiliki kepentingan atas hal tersebut. Kepentingan mempengaruhi tindakan yang diambil oleh negara pada kebijakan luar negeri. Namun, kepentingan-kepentingan tersebut dapat berubah bergantung pada inspirasi atau pandangan baru suatu aktor.

Prinsip Non-Intervensi

Prinsip non intervensi menjadi satu prinsip penting dalam hubungan internasional. Hal tersebut dapat dianggap sebagai patokan yang memberikan batasan urusan antar setiap negara. Prinsip non intervensi merupakan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain atau tidak mencampuri urusan internal suatu negara tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan. Hal itu menjadi prinsip umum dalam hukum internasional atau kebiasaan. Prinsip non intervensi pun sudah menjadi hal prinsip yang mendasar. Dalam studi hubungan internasional selalu mengingatkan bahwa semua negara di dunia memiliki kedaulatan masing-masing. Menurut hukum internasional dikutip dari jurnal (Nuralisa & Hotima, 1970) negara memiliki kedaulatan

sebagai kekuasaan tertinggi dan tidak bawah kekuasaan negara lain. Negara-negara memiliki hak untuk mengatur arah sistem negaranya. Menurut Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB negara-negara dilarang untuk melakukan intervensi baik secara politik, ekonomi, atau sosial. Negara-negara memiliki kebebasan untuk menentukan urusan ataupun permasalahan dalam negeri tanpa intervensi pihak eksternal seperti negara lain.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif menurut Sugiyono dikutip dari jurnal (Septiani & Wardana, 2022) merupakan pendekatan dengan memberikan gambaran, ulasan, penjelasan suatu hal berdasarkan realita. Kualitatif deskriptif memberikan gambaran secara luas tentang persoalan yang diangkat dalam tulisan. Pada penelitian ini penulis akan melakukan mengumpulkan data maupun informasi dengan cara studi pustaka yang bersumber dari dari jurnal, artikel, buku, dokumen, maupun situs yang terpercaya. Penulis akan memperoleh data sesuai pada topik yang diangkat terkait upaya yang dilakukan oleh Tiongkok dalam menjembatani penyelesaian konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia tahun 2020-2022.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia Tahun 2020-2022

Ethiopia memiliki banyak etnis dengan total kurang lebih 90 etnis. Oromo merupakan etnis terbesar dengan populasi 40 juta orang, Amhara 26,9%, Tigray 6% dan sisanya suku kecil seperti Gurage 2,5% serta Gedeo 1,3% (Canada, 2021). Konflik internal di Ethiopia yang melibatkan etnis-etnis telah terjadi sejak zaman Kekaisaran tetapi cenderung diabaikan oleh pemerintah karena lebih berfokus pada pembangunan negara. Hal itu ditinjau tahun 1950-1992 etnis Amhara menempati posisi dominasi di Ethiopia (Riddle, 2015). Pada masa itu etnis seperti Oromo dan Tigray berjuang untuk mencapai hak-hak mereka. Hingga pada tahun 1991 koalisi etnis yang dinamakan EPRDF berhasil menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh Haile Mariam. Sejak saat itu EPRDF yang dipimpin TPLF menduduki kekuasaan Ethiopia. Mempelajari pengalaman masa lalu, EPRDF membentuk sistem federalisme. Akan tetapi konflik internal yang menyeretkan etnis Ethiopia semakin muncul di permukaan pasca federalisme terbentuk.

Konflik internal kembali terjadi tahun 2020 melibatkan etnis Tigray yang dipimpin TPLF melawan Pemerintah dipimpin Abiy Ahmed Perdana Menteri Ethiopia. Konflik berlangsung sejak 4 November 2020 berakhir 2 November 2022. Penyebab konflik karena

tindakan serangan yang bermula dari TPLF (Tigray People's Liberation Front) kelompok perwakilan Etnis Tigray terhadap perumahan pasukan pemerintah dan menimbulkan respon tindakan serangan balasan oleh pemerintah (Lumintosari et al., 2021). Konflik tidak hanya sebatas penyebab karena adanya saling serang antar kedua pihak, melainkan memiliki akar penyebab lain. Abiy Ahmed yang merupakan keturunan Oromo ketika menduduki kursi pemerintah melakukan terobosan baru dengan membentuk koalisis baru dinamakan dengan Partai Kemakmuran menyebabkan tergesernya EPRDF, menyelesaikan sengketa wilayah Ethiopia dan Eritrea, melengserkan sebagian besar pejabat Tigray yang dinilai melakukan korupsi, dan penundaan pemilu dengan alasan situasi covid 19 (BBC, 2020). Tindakan tersebut menimbulkan kegelisahan dan kemarahan TPLF.

Kondisi semakin diperburuk karena intervensi pihak lain. Eritrea dan pasukan Amhara membantu Pemerintah Ethiopia sebagai wadah balas dendam kepada TPLF. Eritrea merupakan musuh TPLF ketika masih berkuasa sedangkan Amhara membalas tindakan TPLF yang dirasa memberikan banyak kerugian kepada etnis tersebut pada saat masih memimpin Ethiopia. Sedangkan kelompok militan Oromo mendukung TPLF dengan tujuan untuk melawan Abiy Ahmed yang dianggap kurang memperhatikan etnisnya sendiri. Eritrea juga memanfaatkan konflik tersebut untuk memulihkan nama dan citra negaranya. karena pernah menjadi negara paria akibat keterlibatan dalam mendukung kelompok pemberontak Al-Shabab dan tindakan kooperatif pada konflik Djibouti (Muhammad et al., 2024). Selain itu dapat dinilai tindakan Intervensi Eritrea dapat memperkeruh situasi nasional Ethiopia dan membuka peluang untuk menjadi negara berpengaruh di Kawasan Afrika Timur.

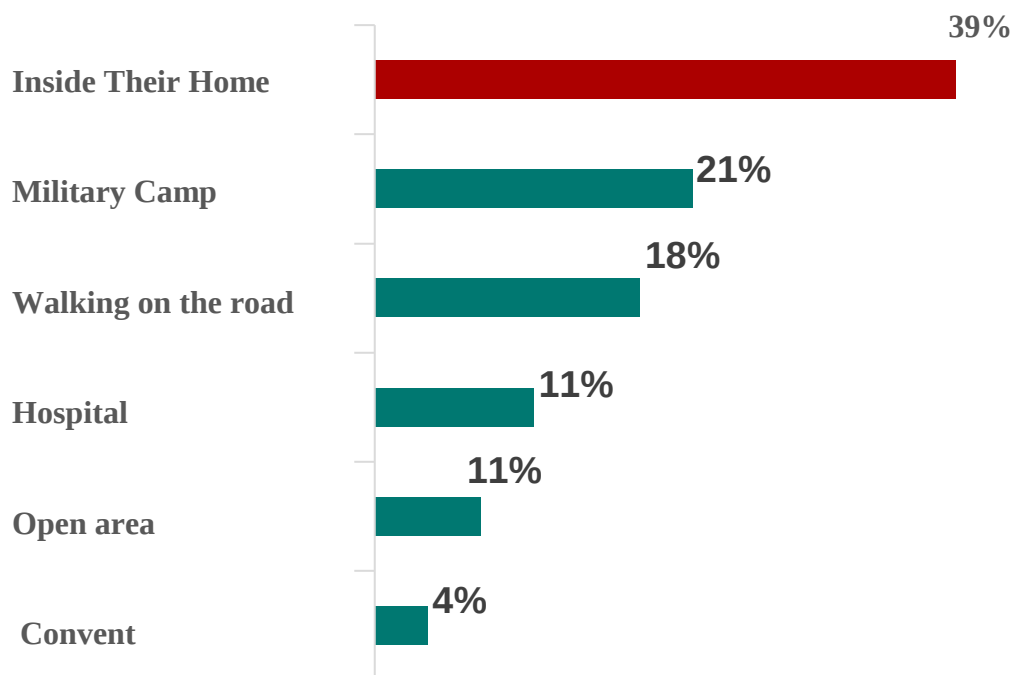


Gambar 1.1 Potret Warga Perempuan dan Anak-Anak Tigray di Pengungsian Sudan

Sumber: Nations (2020)

Gambar tersebut merupakan pengungsi dua Minggu pertama konflik di pusat penerimaan Hamdayet, Sudan Timur. Pusat Penerimaan Hamdayet menjadi lokasi yang lebih dekat dari wilayah Tigray. Konflik internal Ethiopia tahun 2020 menyebabkan dampak eksternal yang diterima oleh Sudan dengan banyaknya pengungsi yang masuk. Pengungsi

berada di kamp seadanya untuk berteduh dan berlindung. Konflik menimbulkan dampak yang serius yang harus diterima oleh masyarakat sipil khususnya perempuan dan anak-anak. Di awal terjadinya konflik menyebabkan sekitar kurang lebih 30.000 orang mengungsi. Para pengungsi tentu mencari tempat perlindungan yang lebih aman untuk keselamatan dari situasi yang terjadi di tempat asal.



Grafik 1. Data Perempuan Tigray Korban Kekerasan dan Pelecehan Tahun 2020-2021

Sumber: Insecurity Insight (2021)

Data yang tertera pada diagram di atas merupakan presentase jumlah perempuan bermayoritas etnis Tigray yang memperoleh tindakan kejam dari para Tentara. Konflik memberikan dampak yang buruk terhadap perempuan menjadi korban kekerasan hingga pelecehan. Dari data tersebut menunjukkan konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia memberikan ancaman yang serius terhadap perempuan ketika dimana pun berada. Lingkungan khusus seperti biara dan rumah sakit pun berpotensi terhadap terjadinya tindakan kejam yang dilakukan oleh para Tentara. Situasi tersebut menunjukkan betapa mengerikan konflik tersebut. Rumah menjadi tempat paling berisiko sehingga tidak mengherankan perempuan dan anak-anak melakukan pengungsian wilayah negara lain. Situasi ini juga menunjukkan lemahnya perlindungan masyarakat sipil pada konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia.

Konflik ini menimbulkan kekerasan hingga pembunuhan. Berdasarkan data OHCHR terdapat kurang lebih 15.000 orang ditahan semenah-menah selama pemberlakuan keadaan darurat oleh pemerintah dan memperoleh tindakan penyiksaan, penghinaan, tidak diberi obat

dan makanan (Ikanningtyas et al., 2024). Berdasarkan laporan UNICEF pada tahun 2021 kurang lebih 2,7 anak di Afar, Amhara dan Tigray tidak dapat bersekolah karena kerusakan infrastruktur serta ditambah situasi covid 19. Kemudian berdasarkan laporan UNICEF disampaikan oleh Direktur Eksekutif UNICEF Henrietta Fore sedikitnya 33.000 anak mengalami kondisi kekurangan gizi akut bahkan terancam kematian. Wanita hamil dan menyusui sebanyak 40% mengalami kekuarangan gizi (UNICEF, 2021a).

Kepentingan Nasional Tiongkok di Ethiopia

Hubungan Diplomatik Ethiopia dan Tiongkok bermula tahun 1970 ketika pada masa Kaisar Haile Selassie I. Pada tahun 1960-an Kaisar Haile Selassie I meninjau hubungan dengan Amerika mulai mengecil. Kaisar Haile Selassie I mempertimbangkan untuk membangun relasi Tiongkok dan memulai hubungan diplomatik tahun 1970. Hubungan Tiongkok dan Ethiopia mengalami dinamika tantangan di tahun 1974 ketika rezim baru lebih memiliki dekat dengan Uni Soviet hingga tahun 1980 an. Pada rezim Meles Zenawi yang memimpin EPRDF pada tahun 1995 hubungan Ethiopia dan Tiongkok mulai mengalami peningkatan. Tiongkok telah memainkan peran signifikan Kawasan Afrika dan menempati posisi sebagai mitra dagang terbesar Kawasan Afrika (Dike & Owusu, 2024). Berdasarkan tinjauan melalui dokumen buku putih kebijakan luar negeri Tiongkok untuk Afrika 2021, Tiongkok memiliki tujuan kepentingan secara umum agar kerjasama yang terjalin dengan mitranya memperoleh hasil dan keuntungan yang seimbang. Hal ini ditegaskan dalam buku putih Tiongkok tersebut bahwa inti dari kebijakan luar negeri Tiongkok untuk Afrika adalah ketulusan, hasil nyata, itikad baik, dan mencapai kebaikan besar dan kepentingan bersama. Tidaklah mengherankan jika Tiongkok memiliki kesempatan besar di Ethiopia melalui citra yang ditawarkan. Tiongkok dan Ethiopia terjalin dalam bidang ekonomi terdiri dari investasi, perdagangan, transfer teknologi, maupun bantuan luar negeri. Keberadaan Tiongkok di Ethiopia lebih banyak bermain pada sektor tersebut berdasarkan Badan Penelitian Institut Perancis Hubungan Internasional Prancis dan Pusat Kebijakan OCP karena Ethiopia tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang banyak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Komisi Investasi Ethiopia (EIC) Tiongkok telah menjadi investor langsung asing, dengan data tahun 1992-2016 jumlah proyek yang diinvestasikan mencapai 20,7 % dan investasi modal 17,9 %. Sedangkan bidang lapangan kerja permanen 14,6% dan lapangan kerja sementara 13,8% (Nicolas, 2017). Ethiopia pun menjadi ladang investasi program raksasa Tiongkok BRI. Terdapat kurang lebih 400 proyek konstruksi dan manufaktur dengan kisaran nilai 4 miliar USD (Fiala, 2021). Kerja sama Tiongkok dan

Ethiopia dalam kerangka BRI secara resmi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Tahun 2018. Akan tetapi kerja sama ekonomi dan teknis kedua negara telah berlangsung sejak penandatanganan kerangka kerja tahun 1971. Pada tahun 1995 mengadakan penandatanganan perjanjian kerja sama perdagangan, perekonomian dan teknis serta Pada tahun 2006 kembali dilakukan Perjanjian kerangka kerja tentang pembiayaan oleh China EXIM Bank untuk Ethiopia.

Ethiopia merupakan kunci kelancaran kepentingan Tiongkok di Kawasan Afrika. Tiongkok menjadikan Ethiopia sebagai wadah politik untuk mencapai kepentingan kekuasaan di kawasan itu. Ethiopia memiliki keunggulan yaitu menjadi pusat diplomatik benua yang berpusat di Addis Ababa pusat Uni Afrika, serta berbagai kantor organisasi non pemerintah. Ethiopia juga sering menjadi tuan rumah dari IGAD (Intergovernmental, Authority on Development). Ethiopia yang menjadi kekuatan militer besar di Afrika Sub-Sahara sebagai panjang tangan melindungi kepentingan Tiongkok salah satunya perusahaan minyak di Sudan Selatan. Tiongkok banyak menunjang dengan perlengkapan dan kebutuhan militer seperti artileri, kendaraan lapis baja ringan, transportasi yang digunakan oleh para pasukan, latihan militer bersama oleh perwira Ethiopia. Kerja sama militer ditandai penandatanganan perjanjian kerja sama militer tahun 2005 oleh Perdana Menteri Meles Zenawi dan Jenderal Zhu Wenquan (Tafey, 2019).

Kerja sama yang terjalin antara Tiongkok dan Ethiopia dalam berbagai hal, mencerminkan identitas Tiongkok sebagai dasar kepentingan nasional negara yang mengedepankan kepentingan bersama dan seimbang. Hal tersebut selalu ditonjolkan pada kebijakan luar negeri yang tertuang melalui buku putih untuk Afrika. Sebagaimana kemudian Alexander Wendt menegaskan bahwa kepentingan datang dari identitas hasil interaksi. Identitas tersebut terselimuti kepentingan yang Tiongkok secara tidak langsung hendak menunjukkan kepada Ethiopia bahwa Tiongkok sebuah mitra yang bertanggung jawab dan dapat dipercayai. Ethiopia menjadi mitra strategis jangka panjang Tiongkok baik untuk kepentingan di internal Ethiopia hingga kawasan. Tiongkok hendak menunjukkan bahwa keduanya adalah mitra yang baik. Tiongkok berusaha membangun kepercayaan dengan mitranya untuk keberlangsungan kepentingan. Menanamkan pengaruh investasi dalam berbagai bentuk menjadi strategi Tiongkok untuk semakin mempererat relasi. Kedua negara Tiongkok dan Ethiopia akan sama-sama memperoleh kepentingan. Secara konkrit Ethiopia memperoleh bantuan dalam pembangunan nasional negara.

Upaya Tiongkok dengan semakin mempererat dan menancapkan pengaruh di Ethiopia bukan sekedar tindakan yang biasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Alexander Wendt

terkait tiga element penting pada struktur sosial yang menjadikan kepentingan dapat bersifat dinamis. Syarat material perwujudannya melalui kerja sama tersebut. Kerja sama yang terjalin kuat karena tuntutan kebutuhan kepentingan Tiongkok berpegang kendali kawasan Afrika termasuk Ethiopia agar terjaga. Bagi Tiongkok secara tidak langsung Ethiopia telah membantu mendorong Tiongkok untuk semakin menancapkan hegemoni di Kawasan Afrika dan internasional. Ethiopia dapat dinilai sebagai pion penting menjaga kepentingan termasuk menjaga investasi Tiongkok. Namun, keberadaan Tiongkok di Ethiopia dapat berubah ketika memiliki pandangan atau pemikiran yang baru. Layaknya kepentingan selalu bersifat dinamis mengikuti identitas yang ada. Dapat dinilai bahwa memang negara-negara Afrika termasuk Ethiopia bergantung atas investasi Tiongkok. Kepentingan yang bercermin pada identitas akan menjadi penentu pengambilan keputusan luar negeri. Pada saat menyelamatkan kepentingan itu bagi Tiongkok identitas masih menjadi patokan atau batasan sebagai negara yang menghormati kedaulatan wilayah negara lain. Tiongkok juga sedang menunjukan dan menjaga identitas sebagai aktor netral yang konstruktif di Kawasan Afrika.

Diplomasi Kuasi Mediasi Tiongkok dalam Menjembatani Penyelesaian Konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia

Konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia tahun 2020-2022 menempatkan Tiongkok untuk berperan penyelesaian konflik melalui strategi diplomasi kuasi mediasi. Diplomasi kuasi mediasi dilakukan demi melindungi kepentingan nasional secara material maupun sosial Tiongkok di Ethiopia. Berikut beberapa upaya diplomasi kuasi mediasi Tiongkok di Ethiopia:

a. Mendorong Prinsip Non- Intervensi

Tiongkok dalam membantu menjembatani penyelesaian konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia tahun 2020-2022 mendorong prinsip non intervensi berbagai kesempatan seperti, pertemuan bilateral dan konferensi regional. Tiongkok yang diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi melakukan pertemuan bersama Menteri Luar Negeri Ethiopia pada 1 Desember 2021. Pada pertemuan Wang Yi menegaskan tidak akan mencampuri urusan internal Ethiopia dan akan menentang aktor eksternal yang mencampuri urusan dalam negeri Ethiopia. Tiongkok menilai bahwa Ethiopia memiliki kapasitas menyelesaikan permasalahan domestiknya (China, 2021). Prinsip non-intervensi kembali digaungkan Tiongkok pada Konferensi Perdamaian dan Pembangunan Pertama Tiongkok-Tanduk Afrika yang dilaksanakan pada Juni 2022. Konferensi tersebut tidak secara eskplisit membahas konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia. Konferensi itu secara tidak langsung menjadi wadah sikap Tiongkok dalam merespon konflik yang cenderung terjadi di

Afrika Timur tak terkecuali Ethiopia. Konferensi itu dicetuskan oleh Tiongkok untuk mendukung kemandirian kawasan hingga tercantum dalam 12 point hasil pertemuan. Dukungan Tiongkok bagi Afrika Timur untuk terus meningkatkan komitmen untuk menyelesaikan penyelesaian konflik secara mandiri dan menolak segala bentuk campur tangan eksternal (FOCAC, 2022).

Prinsip non intervensi yang didorong Tiongkok sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia merupakan sebagai cerminan identitas kebijakan luar negerinya. Prinsip non intervensi merupakan salah satu identitas yang sering dipakai Tiongkok dalam merespon persoalan yang terjadi di dunia internasional. Sejalan dengan prinsip identitas itu, Tiongkok idak terlibat secara langsung dalam penyelesaian konflik. Identitas prinsip non intervensi Tiongkok menjadi patokan sikap Tiongkok terhadap konflik internal Ethiopia. Identitas yang menjadi ciri khas negara untuk memberikan pengaruh pada penyelesaian konflik. Prinsip non intervensi Tiongkok dimulai saat Sidang Nasional Pertama Konsultatif Rakyat Tiongkok tahun 1949 dan disempurnakan berdasarkan pengalaman politik Konferensi Afro Asia di Bandung. Sehingga tindakan Tiongkok ini termasuk identitas personal. Identitas personal mengandung sifat dasar negara yang selalu memiliki ambisi kepentingan tetapi Wendt meluruskan identitas personal dalam konstruktivisme dapat menjadikan negara bertindak lebih lunak berdasarkan identitas yang melekat.

Tiongkok memiliki kepentingan yang banyak di Ethiopia pengaruh yang besar melalui berbagai kerja dan program menyebabkan tidak bertindak secara langsung. Hal ini dikarenakan identitas sedikit berbeda dalam memandang akan ancaman kepentingan. Artinya kepentingan negara dapat diselamatkan dengan cara yang berbeda. Sejalan dengan itu Tiongkok mengambil sikap melantangkan tidak mengintervensi konflik karena Tiongkok ingin selalu dirangkul oleh Ethiopia. Hubungan yang strategis menjadi hal penting bagi Tiongkok. Apabila Tiongkok mengintervensi Tiongkok dapat terlibat secara langsung dalam konflik tersebut. Sebab Ethiopia sendiri tidak ingin untuk menerima intervensi pihak eksternal dan lebih menginginkan penyelesaian mandiri secara regional. Sehingga, identitas prinsip non intervensi menjadi pelindung bagi Tiongkok untuk tidak harus bertolak belakang dengan Pemerintah Ethiopia. Dengan demikian posisi kepentingan nasional Tiongkok masih bisa terjamin.

b. Tiongkok Mendorong Uni Afrika dalam Penyelesaian Konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia

Uni Afrika memiliki peran dalam membantu menjaga perdamaian dan keamanan kawasan. Tiongkok memainkan peran melalui diplomasi kuasi mediasi pada konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia dengan gencar meyakinkan Uni Afrika sebagai pihak utama menyelesaikan konflik. Pertama pada kesempatan pengarahan Dewan Keamanan bulan Agustus 2021 Dai Bing, Charge d'affaires misi tetap Tiongkok untuk PBB menyampaikan agar Uni Afrika menyelesaikan konflik tersebut. Tiongkok menginginkan agar solusi “Afrika atas masalah-masalah Afrika”. Kedua, Upaya ini kemudian dilanjutkan pada bulan November 2021 pada saat rapat Dewan Keamanan PBB, perwakilan Tiongkok yaitu Zhang Jun. Pada saat rapat tersebut Tiongkok kembali menekankan pada penyelesaian konflik secara mandiri oleh Uni Afrika. Tiongkok meminta agar diberikan ruang dan waktu bagi Uni Afrika untuk menjalankan tugas menyelesaikan konflik itu (Fiala, 2021). Selain itu, Tiongkok memanfaatkan pertemuan multilateral FOCAC pada 29-30 November 2021. Pada salah satu point pertemuan tersebut Tiongkok menegaskan kembali dukungan Uni Afrika sebagai pihak utama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kawasan (FOCAC, 2021).

Mendorong penyelesaian permasalahan secara regional menunjukkan loyalitas Tiongkok terhadap norma yang mengikat relasi Tiongkok dan negara-negara Afrika dalam kerangka kerja FOCAC. Norma yang menjadi patokan pada kerja sama FOCAC sejalan dengan identitas Tiongkok yang menunjukkan diri sebagai negara yang menghormati kedaulatan wilayah lain. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Wendt bahwa norma dapat juga memberikan pengaruh terhadap identitas dan berpengaruh pada tindakan. Selain itu, secara khusus pun Uni Afrika memiliki norma atau aturan dasar yang menegaskan penyelesaian masalah Afrika oleh Afrika sendiri. Norma yang dimiliki oleh Afrika membentuk identitas yang mengikat perilaku dan tindakan serta membatasi intervensi pihak eksternal. Tindakan ini semakin menunjukkan citra Tiongkok yang memiliki loyalitas atau kepatuhan yang tinggi terhadap norma regional wilayah Afrika. Sehingga material bukan satu-satunya kepentingan tetapi hal-hal yang bersifat sosial turut menentukan perilaku suatu negara.

Diplomasi kuasi mediasi Tiongkok pada upaya menjembatani penyelesaian konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia berada pada tingkatan ketiga, yaitu

interseksi terbatas. Interseksi terbatas menempatkan mediator pada peran memberikan upaya simbolis dan sementara. Hal itu dijalankan oleh Tiongkok dengan dengan memanfaatkan kekuatan politik sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB menyerukan dukungan kepada Uni Afrika. Keterlibatan Tiongkok pada interseksi terbatas membawa Tiongkok untuk tidak terlibat secara langsung dalam konflik yang terjadi. Bisa dikatakan bahwa diplomasi kuasi mediasi sebagai diplomasi yang dilakukan secara terpaksa penuh kehati-hatian. Dominasi Tiongkok di Kawasan Afrika termasuk Ethiopia sudah sangat kuat. Tiongkok mempertimbangkan hal tersebut. Keterlibatan secara tidak langsung pada upaya penyelesaian konflik Tentu dengan tujuan agar tidak memberikan dampak buruk terhadap kepentingan yang ada di Ethiopia maupun kawasan. Diplomasi kuasi mediasi interseksi terbatas memberikan pengaruh baik terhadap Tiongkok untuk mempertegas patokan keterlibatan Tiongkok.

c. Bantuan Kemanusiaan Tiongkok dan Strategi Pembangunan

Situasi darurat kemanusiaan yang terjadi di suatu wilayah negara tentu akan selalu menyadarkan negara lain untuk memberikan respon bantuan. Hal tersebut salah satunya dilakukan oleh Tiongkok. Pada 2021 melalui lembaga bantuan internasionalnya yaitu Badan Kerja Sama Pembangunan Internasional Tiongkok (CIDCA) memberikan berbagai barang pasokan medis kepada Kementerian Kesehatan, yang kemudian digunakan UNICEF untuk memberikan pelayanan kesehatan terhadap bayi di wilayah Tigray. Terdapat beberapa barang medis yang diserahkan kepada Kementerian Kesehatan seperti gelembung tekanan saluran napas positif berkelanjutan, resusitasi neonatus, termometer, okimeter denyut nadi, dan lain-lain. Tiongkok pun dalam beberapa kesempatan mengirimkan bantuan kemanusiaan makanan dan vaksin (UNICEF, 2021b).

Upaya Tiongkok dengan memberikan bantuan kemanusiaan sejalan dengan norma dasar dalam hukum internasional. Prinsip non intervensi merupakan prinsip dasar diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB untuk tidak mencampuri urusan negara lain, sebab negara memiliki kebebasan dan hak untuk mengurus negara sendiri. Sikap yang diambil Tiongkok dengan menjembatani penyelesaian konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia menunjukkan bahwa Tiongkok mematuhi norma atau aturan tersebut. Prinsip non-intervensi bertujuan agar meminimalisir permasalahan yang lebih parah. Pendekatan Tiongkok yang memilih untuk tidak terlibat secara langsung dalam penyelesaian konflik tidak berlaku untuk bantuan kemanusiaan.

Memberikan bantuan kemanusiaan tidak akan berpengaruh terhadap kedaulatan negara Ethiopia. Bantuan kemanusiaan Tiongkok sebagai solidaritas Tiongkok untuk kemanusiaan menyelamatkan masyarakat sipil menanggung dampak . Bantuan makanan dan barang perlengkapan medis membantu memenuhi kelangsungan hidup masyarakat.

Prinsip non intervensi dan menghormati kedaulatan wilayah lain berpengaruh terhadap tindakan yang diambil dalam setiap persoalan konflik. Ditinjau respon Tiongkok memberikan solusi berkelanjutan. Pada konferensi Pers di Addis Abbaba pada tanggal 14 Maret 2023 Xue Bing menyampaikan Tiongkok akan mendukung pemulihan wilayah yang memperoleh dampak konflik. Tindakan tersebut diperlukan untuk mencapai perdamaian dan kemakmuran berkelanjutan Ethiopia. Hal itu berdasarkan pada pertemuan bilateral yang dilaksanakan pada Januari 2023 bersama Abiy Ahmed (Xinhua, 2023). Kunjungan bilateral juga dilakukan bulan Desember 2023 Xue Bing mengunjungi Tigray dan bertemu dengan pejabat Tigray membahas terkait motivasi Tiongkok untuk merekonstruksi wilayah tersebut dan mengarahkan kembali perusahaan Tiongkok ke Tigray. Xue Bing juga mengunjungi wilayah Afar yang terkena dampak konflik. Sebelumnya pada bulan Juni 2023 Zhao Zhiyuan juga mengunjungi wilayah itu dan menyampaikan hal yang sama.

Strategi pembangunan Tiongkok berdasar pada prinsip pembangunan untuk perdamaian (Bruggeman, 2022). Perdamaian akan tercapai dengan dilakukan pembangunan yang baik. Konflik yang terjadi menimbulkan dampak dan kerusakan yang parah. Situasi harus dipulihkan demi keamanan dan kesejahteraan. Hal itu menjadi peluang bagi Tiongkok terus menggunakan reputasi sebagai negara memiliki modal besar dan berperan besar dalam pembangunan kawasan Afrika termasuk Ethiopia. Tiongkok dinilai pandai bercermin akan kebutuhan Ethiopia. Ethiopia sebagai wilayah yang memperoleh dampak konflik tentu sangat membutuhkan pemulihan. Rekonstruksi yang akan dilakukan secara positif akan memberikan pemulihan bagi keadaan wilayah yang akan memberikan dampak baik juga terhadap Ethiopia. Merekonstruksi wilayah yang terkena dampak konflik sama dengan memulihkan kepentingan Tiongkok di Ethiopia. Sebagian dari proyek dan perusahaan Tiongkok yang berada di daerah konflik terkena dampak.

Peran Tiongkok sebagai Mediator Global

Penyelesaian konflik oleh suatu intitas negara biasanya menggunakan pendekatan secara diplomatik seperti mediasi. Tiongkok sering memainkan peran sebagai mediator global.

Tiongkok menjadi mediator terjadi peningkatan sejak BRI (Belt and Road Initiative) diluncurkan pada tahun 2013. Sebelumnya peran Tiongkok dalam penyelesaian konflik cenderung pasif dikarenakan prinsip non intervensi yang selalu dipegang Tiongkok. Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika menjadi kawasan fokus upaya mediasi Tiongkok (Legarda, 2018). Peningkatan peran Tiongkok sebagai mediator global pasca BRI diluncurkan dapat ditinjau sebagai memihara pengendalian kekuasaan atas wilayah negara lain. Tiongkok dalam memainkan peran sebagai mediator global dinilai sebagai penjagaan stabilitas keamanan di wilayah yang memberikan peluang kelancaran keberadaan investasi dan perdagangan Tiongkok.

Tiongkok memiliki ciri khas dalam pendekatan mediasi penyelesaian konflik yaitu strategi memfasilitasi secara politik dan logistik dari pada menjadi mediator secara langsung dan memberikan insentif pembangunan termasuk ekonomi (Matahari, 2024). Pertama, Peran Tiongkok memberikan kesempatan untuk mencapai perdamaian secara mandiri berdasarkan kesepakatan pihak berkonflik. Kedua, peran Tiongkok dengan memberikan insentif memberikan keuntungan ke semua pihak tak terkecuali Tiongkok. Ketiga, strategi pembangunan Tiongkok cukup memberikan keuntungan untuk jangka panjang untuk semua pihak. Namun, mediasi Tiongkok cenderung menggunakan pendekatan yang tradisional yaitu dengan berfokus pada tingkat pemerintah, melakukan diplomasi tingkat tinggi, menggunakan utusan khusus, hingga menjadi tuan rumah (Legarda, 2018). Sehingga mediasi Tiongkok memang cukup kurang efektif karena cenderung tidak merangkul semua pihak yang terlibat dalam konflik.

Peran Tiongkok tidak hanya pada posisi sebagai penengah tapi melalui diplomasi multilateral. Tiongkok memiliki pandangan bahwa kemiskinan menjadi sarang pemicu kejahatan atau ketimpangan sosial berdampak konflik bahkan pemberontakan. Tiongkok bersama negara-negara Afrika beserta Komisi Uni Afrika (AUC) memiliki kerangka kerja sama yang dinamakan dengan FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation). Tiongkok telah membantu hingga miliaran dolar untuk pembangunan Afrika mulai dari pembangunan rel kereta api, jalan raya, infrastruktur komunikasi, serta relokasi di Dakar. KTT FOCAC saat itu menghasilkan 32 point deklarasi yang merangkum terkait ekonomi, pembangunan, sosial, dan investasi. Pada point ke 21 deklarasi KTT pelabuhan (Tedeku, 2021). FOCAC pun pernah dilaksanakan pada 29-30 November 2021 di Beijing, Tiongkok berkomitmen untuk mendorong peningkatan investasi di Afrika (FOCAC, 2021). Kerja sama FOCAC dan komitmen Tiongkok menjadi cerminan upaya Tiongkok untuk mencapai prinsip pembangunan untuk perdamaian. Pembangunan satu dari berbagai solusi untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Konsep kepentingan nasional menurut Alexander Wendt dapat menjadi acuan analisis untuk peran Tiongkok dalam mediator global dan kerja sama multilateral. Kepentingan nasional lahir dari identitas yang dihasilkan melalui proses interaksi dengan aktor lain. Melalui kerja sama multilateral dan peningkatan peran sebagai mediator global menjadi wadah untuk semakin membentuk identitas Tiongkok sebagai negara yang bertanggungjawab dan memiliki kapasitas dalam menciptakan perdamaian. Selain itu, Tiongkok dapat memanfaatkan eksistensinya sebagai negara yang memiliki modal besar melalui kerja sama multilateral untuk perdamaian yang berkelanjutan. Interaksi yang terjalin melalui diplomasi multilateral dan peningkatan dalam mediator global meningkatkan legitimasi dan pengakuan sebagai kekuatan global. Dengan demikian suatu negara harus mampu memiliki kekuatan yang dapat ditawarkan dan mempengaruhi aktor negara lain dalam berbagai strategi. Kerja sama multilateral menjadi wadah bagi Tiongkok semakin mempererat relasi dan ketergantungan negara lain. Dengan demikian kepentingan Tiongkok akan semakin terjaga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan disimpulkan strategi diplomasi kuasi mediasi Tiongkok dalam upaya membantu menjembatani penyelesaian konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia tercermin melalui identitas identitas personal dan identitas yang dihasilkan atas interaksi sosial yang kemudian menjadi norma atau ketentuan. Hal tersebut sejalan dengan teori konstruktivisme identitas yang dikemukakan oleh Alexander Went. Prinsip berdasarkan identitas tertuang dalam diplomasi kuasi mediasi. Diplomasi kuasi mediasi Tiongkok berada pada tingkatan interseksi terbatas, yang menempatkan Tiongkok pada tindakan yang bersifat simbolis dan sementara. Diplomasi kuasi mediasi Tiongkok dilakukan yaitu menekankan prinsip non intervensi, mendukung Uni Afrika menjadi mediator, dan memberikan sumbangan kemanusiaan. Tiongkok memiliki solusi pasca konflik yaitu membantu rekonstruksi wilayah terkena dampak konflik. Upaya Tiongkok dengan mendorong prinsip non-intervensi juga dinilai cerminan terhadap norma atau hukum dasar dalam hubungan internasional menghormati negara lain.

Upaya Tiongkok dalam menjembatani penyelesaian konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia melalui diplomasi kuasi mediasi dikarenakan memiliki kepentingan nasional. Tiongkok hendak menunjukan pada aktor internasional lainnya, bahwa Tiongkok memiliki cara dan strategi yang berbeda. Cara yang digunakan Tiongkok cenderung diterima dalam penyelesaian konflik internal Ethiopia, karena tidak mengintervensi secara langsung. Tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok bukan hanya karena kepentingan material melalui berbagai

kerja sama yang telah terjalin tetapi karena adanya faktor sosial hasil interaksi. Tiongkok memberikan ruang terhadap regional untuk menyelesaikan permasalahan secara independen sesuai harapan mereka dan menjadi patokan relasi.

Pada penelitian selanjutnya dapat melakukan eksplorasi lebih mendalam terkait upaya Tiongkok dalam membantu menjembatani penyelesaian konflik Tigray dan Pemerintah Ethiopia. Selain itu, dapat menjadikan penelitian ini untuk dikembangkan menggunakan perspektif atau teori yang berbeda. Penulis untuk penelitian selanjutnya dapat melakukan komparasi dengan upaya yang dilakukan oleh aktor internasional lainnya dalam mencoba menyelesaikan konflik yang terjadi. Demikian saran yang dapat diberikan penulis untuk keberlanjutan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Admassu, M. D. (2019). CAUSES OF ETHNIC CONFLICT IN ETHIOPIA AND ITS EFFECT ON DEVELOPMENT “AMHARA” AND “GUMUZ” COMMUNITIEZ. *Journal of Sustainable Development in Africa* Africa, 21(3), 64–78.
- BBC, N. I. (2020). Krisis Tigray di Ethiopia: Apa yang Terjadi?-Penjelasan dalam Versi Pendek, Sedang, dan Panjang. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-54996885>
- Bruggeman, B. (2022). Case study on China’s andSweden’s developmentstrategy in Ethiopia. *Linnaeus University* , 991505.
- Canada, I. and R. (2021). The situation of different ethnic groups in Addis Ababa, including access to housing, employment, education, and healthcare; particularly the Amhara [Amara], Oromo, Tigrayan, Gurage, and Gedeo people, and their treatment by Oromo nationalists and by the Q. *ecoi.net*. <https://www.ecoi.net/en/document/2063732.html>
- China, M. (2021). Wang Yi Meets with Ethiopian Deputy Prime Minister and Foreign Minister Demeke Mekonnen. Ministry of Foreign Affairs the People’s Republic of China. https://www.mfa.gov.cn/eng/wjb/zzjg_663340/fzs_663828/xwlb_663830/202112/t20211202_10461128.html
- Dike, M. C., & Owusu, R. A. (2024). China–Africa relationships: A systematic literature review and future directions. *Africa Journal of Management*. <https://doi.org/10.1080/23322373.2024.2421709>
- Fiala, L. (2021). Why Ethiopia’s Fate Matters to China. *ITALIAN INSTITUT FOR INTERNATIONAL POLITICAL STUDIES*. <https://www.ispionline.it/en/publication/why-ethiopias-fate-matters-china-32469>

- FOCAC. (2021). Dakar Declaration of the Eighth Ministerial Conference of the Forum on China-Africa Cooperation. Forum on China and Africa Cooperation. http://www.focac.org/eng/zywx_1/zywj/202201/t20220124_10632443.htm
- FOCAC. (2022). Roundup: First China-Horn of Africa peace conference concludes with call for realizing shared aspirations. Forum on China and Africa Cooperation. http://www.focac.org/eng/zfzs_1/202206/t20220623_10708534.htm
- Ikaningtyas, Putri, M. T., Rachmawati Madjid, Y., Susanto, F. A., & Ruslijanto, P. A. (2024). the Urgency in Legal Protection of the Internment in Non-Internationalarmed Conflict Between the Ethiopian Government and the Tigray People’S Liberation Front. *Indonesian Journal of International Law*, 21(2), 87–118. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol21.2.5>
- Insecurity Insight. (2021). Sexual Violence in Ethiopia’s Tigray Region. March, 1–5. <http://insecurityinsight.org/wp-content/uploads/2021/03/Sexual-Violence-in-Ethiopia-Tigray-Region-30-March-2021.pdf>
- Legarda, helena. (2018). China as a conflict mediator Maintaining stability along the Belt and Road. Mercator Institue for China Studies. <https://merics.org/en/comment/china-conflict-mediator>
- Lumintosari, F. R., Lumintosari, F. R., & Lumintosari, F. R. (2021). Peran Unchr Dalam Permasalahan Pengungsi Konflik Ethiophia-Tigray. *Global Mind*, 3(2), 48–58. <https://doi.org/10.53675/jgm.v3i2.292>
- Matahari, Y. (2024). China Steps Into Conflict Mediation. Conciliation Resources. <https://www.c-r.org/accord/still-time-talk/china-steps-conflict-mediation>
- Mekelle & Nairobi. (2023). Ethiopia’s Tigray crisis: Deaths from starvation after aid halted - official. BBC NEWS. <https://www.bbc.com/news/world-africa-66540039>
- Migration, M. C. (2021). The Impact of the Tigray crisis on Ethiopian and Eritrean Onward Movements within Sudan and to Libya and Tunisia.
- Muhammad, N. F. A., Putri, G. H., Aulia, D. F., & Prakoso, S. G. (2024). Unraveling the Political Motives of Eritrea in the Tigray Conflict. *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 13(1).
- Nanda, S. (2024). Diplomasi Kuasi-Mediasi Tiongkok dalam Konflik Arab Saudi dan Iran. Universitas Diponegoro.
- Nations, U. (2020). Ethiopia: UN concern mounts over shortages, child welfare, in ongoing Tigray crisis. UN News. <https://news.un.org/en/story/2020/12/1079562>

- Nicolas, F. (2017). Chinese Investors in Ethiopia: The Perfect Match? https://www.ifri.org/sites/default/files/migrated_files/documents/atoms/files/nicolas_chinese_investors_ethiopia_2017.pdf
- Nuralisa, R., & Hotima, D. P. (1970). Analisis Prinsip Non Intervensi Hukum Internasional Dalam Konteks Perang Teluk 1 Antara Irak-Iran. 207–215.
- Riddle, C. E. (2015). Ethnic Ethiopians: A Case Study of Discrimination Occurrence in Ethiopia. Fall. http://opensiuc.lib.siu.edu/gs_rp
- Sari, V. Y., Nugrahaningsih, N., & Nuzulian, U. (2022). Implementasi Rezim Internasional dalam Menangani Conflict-Related Sexual Violence di Tigray. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 154. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v7n1.8>
- Septiani, R. A. D., & Wardana, D. (2022). Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Minat Membaca. *Jurnal Perseda*, V(2), 130–137. <https://doi.org/10.37150/perseda.v5i2.1708>
- Sun, D. & Zoubir, Y. (2017). China's Participation in Conflict Resolution in the Middle East and North Africa: A Case of Quasi-Mediation Diplomacy? *Journal of Contemporary China*, 27(110), 224–243.
- Tafey, A. (2019). China-Ethiopia Relations and the Horn of Africa. *Italiann Institute for International Political Studies*. <https://www.ispionline.it/en/publication/china-ethiopia-relations-and-horn-africa-23968>
- Tedeku, M. (2021). Beyond Conflicts: China's Role in Africa's Peacebuilding. *Africa-China Centre for Policy & Advisory*. <https://africachinacentre.org/beyond-conflicts-chinas-role-in-africas-peacebuilding/>
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS.
- Wijayanti, D. T., & Aini, S. N. (2023). Uni Afrika: Membangun Jembatan Perdamaian Dalam Konflik Pemerintah Ethiopia Dan Tigray. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 5. <http://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/48017%0Ahttps://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/download/48017/21689>
- Xinhua. (2023). China supports Ethiopia's efforts to achieve national peace, development: special envoy. [Xinhuanet.com. https://english.news.cn/africa/20230315/a7fdb2bfb4c848e696db749cac6b92a7/c.html](https://english.news.cn/africa/20230315/a7fdb2bfb4c848e696db749cac6b92a7/c.html)
- Zhou, Q. (2025). China-Ethiopia Trade, Investment, and Opportunities. *China Briefing*. <https://www.china-briefing.com/news/china-ethiopia-trade-investment-opportunities/>